

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat penting dalam pembangunan negara dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, ekologi, sosial, dan keamanan. Dengan memiliki 17.499 pulau dan total luas sekitar 7,81 juta km², Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Wilayah lautnya mencakup 3,25 juta km² dengan 2,55 juta km² di antaranya membentuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (KKP, 2020). Sebagai negara kepulauan terbesar, pelabuhan menjadi pusat utama titik penghubung, sehingga penting untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan pelabuhan. Pengelolaan yang baik, sistematis, dan terintegrasi dengan berbagai pengguna layanan pelabuhan, serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi merupakan kunci untuk mencapai hal tersebut (Ahmadi, N., *et al.* 2016). Menurut data dari sistem informasi pelabuhan Direktorat Kepelabuhanan tahun 2024, Indonesia memiliki 690 pelabuhan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang dikelompokkan ke dalam empat kelas berbeda sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 08 tahun 2012.

Pelabuhan perikanan memegang peran penting sebagai pusat kegiatan penangkapan ikan dan menjadi pendorong utama dalam pengelolaan serta pengembangan sumber daya perikanan. Fokusnya adalah menghasilkan produk perikanan dengan memperhatikan prinsip *biosecurity* (keamanan hayati) dan *traceability* (ketertelusuran) produk yang dihasilkan (Aswanah *et al.*, 2013). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan metode untuk menerapkan prinsip ketertelusuran pada ikan yang ditangkap melalui buku catatan elektronik (*e-logbook*). Walaupun demikian, prinsip *biosecurity* untuk pelabuhan perikanan belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip *biosecurity* menekankan

pentingnya menjaga keamanan ikan tidak hanya saat penangkapan, tetapi juga saat proses pendaratan di dermaga dan penjualan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kebersihan, higienitas, dan sanitasi lokasi dapat mempengaruhi kualitas ikan tangkapan. Kondisi yang kurang bersih, sanitasi yang kurang memadai, dan lingkungan yang tidak sehat dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menempel pada ikan (Wahyudi *et al.*, 2017). Oleh karena itu, manajemen pelabuhan perikanan harus mengutamakan pelaksanaan yang ramah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan 5 agenda prioritas KKP, pada poin ketiga yakni kebijakan pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 41 tentang perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan di pelabuhan perikanan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan *European Sea Ports Organization* (ESPO). KKP juga harus memperhatikan aspek kualitas dan pencemaran air, udara, dan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar ISO (*International Organization for Standardization*) 14001 tentang lingkungan (Curkovic, S., & Sroufe, R., 2011). Sejak tahun 2013, KKP telah mengembangkan konsep *Eco Fishing Port* (EFP). Konsep ini mengusung strategi pengelolaan pelabuhan yang bertujuan mencapai keseimbangan antara nilai atau biaya, manfaat lingkungan sekitar dan aspek ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan untuk mendukung pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan (Manalu, J. *et al.*, 2022).

Konsep EFP mengambil prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan pelabuhan yang telah diterapkan di negara-negara Uni Eropa dan menerapkannya di pelabuhan perikanan Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas produk perikanan agar memenuhi standar ekspor yang tinggi dan dapat diterima di pasar tujuan (Nugraha *et al.*, 2014).

Tidak hanya untuk kepentingan ekspor, tetapi juga penting bahwa kualitas hasil tangkapan ikan yang beredar di masyarakat memiliki standar yang baik. EFP memiliki peran yang penting dalam praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, memungkinkan pelabuhan untuk menghadapi, mencegah, dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari kegiatan di pelabuhan perikanan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan, metode, atau prosedur yang sistematis untuk membangun dan menjaga pelabuhan yang ramah lingkungan. EFP juga bertujuan untuk mengurangi masalah lingkungan di pelabuhan, termasuk buruknya kualitas air laut, pencemaran udara, kebisingan dari limbah industri dan mesin, kerusakan terhadap keanekaragaman hayati akibat pencemaran air dan udara, serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Resiko lingkungan yang tinggi, limbah kapal, warisan budaya, dan keselamatan serta kesehatan kerja karyawan pelabuhan dirancang secara sistematis untuk ditangani, diimplementasikan, dipantau, diverifikasi, dan ditingkatkan oleh manajemen pelabuhan (Aulia *et al.*, 2017).

Sebagian besar pelabuhan perikanan di Indonesia, termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, belum melakukan pengelolaan pelabuhan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Terletak di Desa Teluk, Kecamatan Pandeglang, Provinsi Banten, PPP Labuan merupakan pusat kegiatan bagi masyarakat nelayan, terutama dalam hal penangkapan, produksi, pengolahan, pemasaran, dan promosi hasil perikanan. Pada tahun 2020, jumlah unit penangkapan ikan di PPP Labuan mencapai 2.055 unit (Badan Pusat Statistik, 2020) dengan hasil tangkapan mencapai 26.221.457 ton pada tahun 2022 (Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2022). Dengan potensi hasil tangkapan yang demikian besar, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kondisi Pelabuhan Labuan, dengan menggunakan parameter EFP, guna menemukan alternatif yang mendukung keseimbangan antara lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan konsep EFP di PPP Labuan menjadi sangat relevan, mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Konsep *Eco Fishing Ports* (EFP) di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan *Eco Fishing Ports* (EFP) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan?
2. Bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk mengembangkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan dengan menggunakan analisis SOAR?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian penerapan *Eco Fishing Ports* (EFP) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan.
2. Mengetahui strategi pengembangan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan menggunakan analisis SOAR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian serta mengevaluasi sejauh mana manajemen PPP Labuan sesuai dengan konsep *Eco Fishing Port* (EFP) yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pelabuhan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini akan memberikan wawasan penting bagi peneliti sendiri serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut bagi peneliti yang tertarik pada pengembangan pelabuhan yang ramah lingkungan sesuai dengan konsep EFP.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan terkait manajemen Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan agar melakukan pengelolaan pelabuhan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber referensi, informasi, hingga penerapan bagi daerah pelabuhan untuk menerapkan konsep *Eco Fishing Port* (EFP) atau pelabuhan berwawasan lingkungan.

1.5 Struktur Organisasi

Sistematika penulisan berperan sebagai panduan untuk memberikan struktur dan arah yang lebih terorganisir pada sebuah tulisan. Penelitian ini memiliki susunan penulisan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

1. **BAB I Pendahuluan**, bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, merumuskan permasalahan, menetapkan tujuan penelitian, membahas manfaat penelitian, dan menjelaskan struktur organisasi.
2. **BAB II Kajian Pustaka**, bab ini penulis memaparkan teori-teori yang mendukung proses penelitian dan menjadi dasar untuk pelaksanaan penelitian.
3. **BAB III Metode Penelitian**, bab ini berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.
4. **BAB IV Hasil dan Pembahasan**, di mana penulis menyajikan hasil penelitian dan membahas temuan tersebut dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya.
5. **BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**, bab ini mencakup rangkuman kesimpulan dari penelitian, implikasi dari hasil temuan, dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.